BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan output barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu sasaran utama dalam proses pembangunan daerah (Majid dkk, 2025).

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target utama yang senantiasa menjadi fokus perhatian pemerintah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai wilayah (Pratama dkk, 2026). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,11 %. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi nasional terus menunjukkan

perkembangan yang positif, didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Meskipun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar. Perbedaan tersebut mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah secara optimal.

Menurut Agus Widodo (2021:22), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya output atau pendapatan riil yang dihasilkan oleh suatu wilayah sehingga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) (Mulyani, 2021). Penggunaan PDRB ADHK bertujuan untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Dengan demikian, indikator tersebut dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan output barang dan jasa yang dihasilkan dari waktu ke waktu

Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan masih menjadi tantangan bagi berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumba Tengah. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sumba Tengah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Namun demikian, sebagai daerah yang masih berkembang, Kabupaten Sumba Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas fiskal yang relatif rendah, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Tengah, Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah selama periode 2016–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,82 % dan meningkat menjadi 5,01 % pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis menjadi 0,86 % akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat secara bertahap menjadi 1,41 % pada tahun 2021, 2,58 % pada tahun 2022, 2,85 % pada tahun 2023, 3,70 % pada tahun 2024, dan mencapai 5,06 % pada tahun 2025.

Meskipun menunjukkan tren pemulihan setelah pandemi, perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas

pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi ini menjadi masalah yang penting untuk dikaji karena pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi efektivitas pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam era otonomi daerah, salah satu faktor yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Kemampuan tersebut tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Menurut Mardiasmo (2021:103), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Secara teoritis, peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan yang produktif. Peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan yang didukung oleh ketersediaan anggaran daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Selain PAD, faktor lain yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah

daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Belanja Modal meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai sarana publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, menarik investasi, serta menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Nanang Qosim (2025:75), belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan pembangunan daerah

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sumba Tengah, berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Tengah selama periode penelitian.

Tabel 1.1

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016–2025

Tahun	PAD (Milyar Rp)	Belanja Modal (Milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	22,14	163,73	4,82
2017	29,52	142,90	4,92
2018	28,76	139,08	4,95

2019	30,46	135,56	5,01
2020	30,58	105,95	0,86
2021	27,51	95,60	1,41
2022	14,27	135,24	2,58
2023	14,56	154,80	2,85
2024	24,24	120,26	3,70
2025	23,11	48,77	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Sumba Tengah dan DJPK Kementerian Keuangan

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah mengalami perkembangan yang berfluktuasi selama periode penelitian. PAD meningkat dari Rp22,14 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp30,58 miliar pada tahun 2020. Namun, pada tahun-tahun berikutnya PAD mengalami penurunan hingga mencapai Rp14,27 miliar pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri masih belum stabil dan belum mampu tumbuh secara konsisten.

Belanja Modal Kabupaten Sumba Tengah juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2016 Belanja Modal tercatat sebesar Rp163,73 miliar dan terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp95,60 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya Belanja Modal meningkat kembali pada tahun 2022 dan 2023, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya perubahan

kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah juga menunjukkan perkembangan yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,82 % pada tahun 2016 menjadi 5,01 % pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 0,86 % pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,06 % pada tahun 2025.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal juga menunjukkan perkembangan yang tidak stabil selama periode penelitian. Fluktuasi PAD mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri masih belum konsisten, sedangkan fluktuasi Belanja Modal menunjukkan adanya perubahan prioritas dan kapasitas penganggaran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena secara teoritis PAD dan Belanja Modal merupakan instrumen fiskal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Apabila diamati lebih lanjut, perkembangan PAD dan Belanja Modal tidak selalu diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi yang searah. Pada tahun 2022 misalnya, PAD mengalami penurunan dari Rp27,51 miliar menjadi Rp14,27 miliar, tetapi pertumbuhan ekonomi justru meningkat dari 1,41 persen menjadi 2,58 persen. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2025 ketika

Belanja Modal menurun secara signifikan menjadi Rp48,77 miliar, namun pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,06 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah belum menunjukkan pola yang konsisten.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal benar-benar memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah. Secara teoritis, peningkatan PAD dan Belanja Modal seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, kondisi empiris menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan kedua variabel tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi yang searah. Dengan demikian, diperlukan penelitian empiris untuk membuktikan hubungan antara variabel-variabel tersebut serta mengetahui apakah fluktuasi PAD dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah.

Penelitian mengenai pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan sebelumnya.Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irwin (2025), dengan Judul "Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD

lebih konsisten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan Belanja Modal yang belum sepenuhnya produktif.

Penelitian oleh Manengkey (2022), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Petumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010-2020. Hasil penelitian menunjukan Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal lebih konsisten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada daerah lain sehingga belum mampu menggambarkan kondisi spesifik Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda. Kabupaten Sumba Tengah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat serta kemampuan PAD yang relatif terbatas sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2016–2025 karena rentang waktu tersebut mampu menggambarkan dinamika kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah secara lebih komprehensif. Periode tersebut mencakup kondisi sebelum pandemi Covid-19, saat pandemi, dan masa pemulihan ekonomi pascapandemi sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai perkembangan PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan fenomena fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah, ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris, serta adanya research gap pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan keuangan daerah, serta memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016–2025".

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumba Tengah''

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah?

1.4 Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Persoalan Penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris

mengenai implementasi desentralisasi fiskal dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi alokasi Belanja Modal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan belanja pembangunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.